

MODEL KETERKAITAN WILAYAH DALAM PENENTUAN PUSAT EKONOMI DI INDONESIA

Hendra Kusuma

Ekonomi Pembangunan/Universitas Muhammadiyah Malang

*Korespondensi: hendrakusuma@umm.ac.id

ABSTRACT

Abstract comprehensively describe the entire article, use single space in one paragraph, 10pt Times New Roman, 250 words maximum, provide three to five keywords. Abstract is written without reference, abbreviation, and footnote. Abstract consist of main idea, objectives, methods, results and discussion. Abstract is not a mathematical writing, question and assumption, not a copy paste sentence from the article.

Keywords:

ABSTRAK

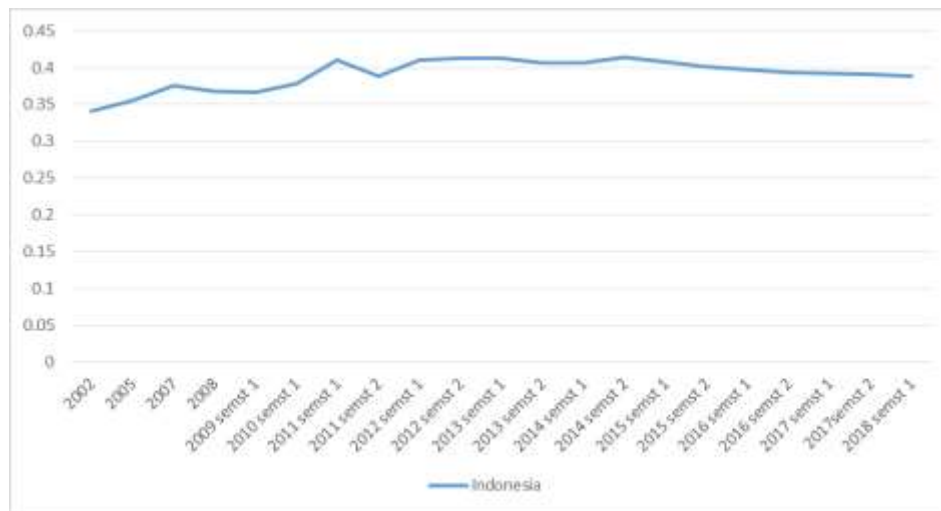
Kegiatan ekonomi di suatu wilayah tidak terlepas dari aktivitas ekonomi dari wilayah sekitarnya. Salah satu cara untuk melihat pemerataan ekonomi adalah dengan nilai indeks gini, dimana di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 0,42 yang berarti masih terjadi kesenjangan di wilayahnya. Salah satu cara untuk dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat adalah dengan memahami karakter dan spesialisasi unggulan serta geografis. Tumbuhnya *economic hub* akan dapat mendorong berkembangnya perekonomian di wilayah baru dan dapat menjadi kunci program pemerataan pendapatan. Dengan menggunakan metode potensial demografik yang mempertimbangkan skala ekonomi dan jarak antar wilayah di Indonesia, maka akan dapat membuat sebuah peta pusat ekonomi baru.

Kata kunci: *economic hub*, potensial demografik, pusat ekonomi

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas Negara, perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan usaha dan perencanaan yang baik (Priyadi & Atmadji, 2017). Salah satu ukuran untuk melihat pemerataan ekonomi adalah dengan indeks gini. Nilai dari indeks Gini di Indonesia sejak tahun 2002 menunjukkan peningkatan yang menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan. Ketimpangan dapat terjadi karena sebaran sumber daya alam yang tidak merata ataupun sumber daya manusia, dimana secara umum jumlah penduduk di pulau Jawa relative lebih banyak dibandingkan dengan pulau yang lain. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan produksi antar daerah menjadi salah satu pemicu ketimpangan pendapatan.

Gambar Indeks Gini Indonesia



Sumber : BPS diolah, 2018

Potensi terjadinya ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh system pemerintahan dan kebijakan yang diberlakukan. Potensi dan kemampuan wilayah dalam memanfaatkan sumber daya untuk dapat dimanfaatkan juga menjadi salah satu penyebab utama dalam terjadinya ketimpangan pendapatan. Konsep keunggulan komparatif dimana setiap wilayah yang mempunyai keunggulan masing-masing di desain untuk dapat saling bekerjasama akan menjadi salah satu solusi untuk dapat mencapai pemerataan pendapatan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan menjadi tokoh sentral yang dapat menghubungkan kegiatan masyarakat yang terpisah-pisah sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan (Muta'ali, 1999).

Pemerataan pendapatan juga dapat didukung dengan pembangunan infrastruktur dan kelengkapan dalam menunjang transportasi di Wilayah ataupun antar wilayah. Wilayah sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah area yang secara continue terletak diantara tingkat nasional dan lokal (Kasikoen, 2011). Program pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran transportasi dalam rangka pemerataan ekonomi dapat dilihat dengan telah dibangunnya bandara udara di berbagai tempat baru seperti misalnya di wilayah Jawa Timur seperti di Malang, Banyuwangi. Selain itu pembangunan jalan lintas selatan diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan pemerataan ekonomi.

Penelitian mengenai keterkaitan wilayah sebagai upaya pemerataan ekonomi dapat ditemui dalam (Sabana, 2007) yang salah satu dalam penelitiannya menghasilkan indeks gravitasi. (Priyadi & Atmadji, 2017) dengan menggunakan analisis gravitasi menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara rencana tata ruang dan wilayah Provinsi daerah Yogyakarta dengan analisis gravitasi. Selain itu (Fistung, Miroiu, Tătaru, Iștoc, & Popescu, 2014) menyatakan bahwa fasilitas transportasi sangat mendukung bertumbuhnya perekonomian di Rumania. Demikian pula dengan (Alstadt, Weisbrod, & Cutler, 2012) yang menyatakan bahwa keberagaman akses ke berbagai wilayah akan berdampak pada difersifikasi hasil output yang dihasilkan sehingga dapat memicu pola pertumbuhan ekonomi baru di wilayah.

Keberagaman konsep mengenai kewilayahan dan keadaan di Indonesia yang masih terjadi kesenjangan antar wilayah menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Pendekatan konsep teori gravitasi seperti peneliti sebelumnya menjadi dasar dalam pengembangan pendekatan potensial demografik untuk menentukan potensi pusat ekonomi baru di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan modifikasi pendekatan potensial demografik dimanakah letak pusat ekonomi dan potensi tempat *economic hub* di wilayah di Indonesia. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memetakan letak *economic hub* di Indonesia dan mencari potensi lokasi pusat perekonomian baru yang diharapkan dapat membantu pemerataan ekonomi.

Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang cukup besar, namun hal tersebut belum membawa pemerataan ekonomi secara umum (Hill, Resosudarmo, & Vidyattama*, 2008). Kegiatan ekonomi masih bertumpu di pulau Jawa dan Bali dengan estimasi lebih dari 50% sedangkan pulau Sumatera kegiatan ekonominya diperkirakan 20% dan sisanya merata di seluruh Indonesia. Aliran komoditas di sebuah wilayah bergantung atas *pertama* ketidakmerataan penyebaran penduduk, pendapatan serta sumber daya *kedua* terdapat kegiatan ekonomi skala besar di wilayah tertentu (Isard, 1951).

Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah dapat ikut mendorong aliran transaksi antara wilayah. Seperti halnya yang disampaikan oleh (Cohen, 2010) dimana Output industry manufaktur sangat bergantung pada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Pembangunan tersebut selain memperlancar arus barang produksi yang dihasilkan juga berdampak pada pemerataan ekonomi masyarakat. Pemerataan yang dimaksud adalah dari semakin luasnya potensi usaha yang dapat dilakukan dan semakin mudahnya akses terhadap sumber daya untuk dapat dimanfaatkan. Sedemikian pentingnya sarana dan prasarana bagi perkembangan perekonomian hingga (Fistung et al., 2014) menyampaikan bahwa transportasi berperan aktif dalam perekonomian di Negara Rumania. Perkembangan transportasi tidak terbatas hanya pada alat yang dipergunakan saja, namun juga pada interkoneksi atau fasilitas penunjang transportasi seperti jalan raya.

Demikian pula dengan (Alstadt et al., 2012) yang meneliti tentang hubungan konektivitas transportasi dengan perekonomian, dimana salah satu hasil menyatakan bahwa wilayah yang memiliki akses kepada fasilitas umum akan mempunyai potensi dalam pengembangan industry, perdagangan dan jasa. Konektivitas dan fasilitas yang mendukung dalam mobilisasi hasil produk di suatu wilayah menjadi hal yang sangat penting. Kualitas konektivitas akan mengurangi biaya transportasi sehingga akan meningkatkan pendapatan usaha, atau dengan kata lain bahwa peningkatan biaya perdagangan dipengaruhi oleh jarak dan kualitas transportasi.

Hubungan antara dua lokasi didekati dengan model gravitasi. Untuk keperluan tersebut maka masing-masing lokasi diasumsikan sebagai suatu massa tertentu yang memiliki sifat gaya tarik. Besaran massa yang dimaksud untuk menentukan gaya tarik dapat berupa jumlah penduduk, PDRB, tingkat pendidikan, sumber modal dsb. Sebagai contoh kasus hanya digunakan jumlah penduduk

sebagai satuan massa. Semakin besar massa suatu lokasi yang berkedudukan lebih banyak cenderung untuk lebih menarik bagi banyak orang untuk datang.

Selain ukuran massa lokasi, gaya tarik menarik antara dua massa ditentukan oleh jarak antara keduanya. Semakin dekat jarak antara dua lokasi semakin besar pula gaya tarik yang terjadi antara keduanya. Sebaliknya semakin besar jarak antara dua lokasi semakin kecil gaya tarik yang terjadi antara keduanya. Dengan demikian maka gaya tarik antara dua lokasi berbanding terbalik dengan jarak, selanjutnya mengacu pada hukum gravitasi Newton, maka besar gaya tarik-menarik atau interaksi antara dua lokasi berbanding lurus dengan perkalian massanya (populasi) dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. formulasi tersebut merupakan bentuk umum dari gaya tarik menarik yang dibangun secara hipotetik dengan asumsi bahwa fenomena alam berlaku pula terhadap hubungan gaya tarik menarik dua lokasi.

Interaksi sosial-ekonomi yang dibahas dalam konteks ini dapat berupa volume transaksi perdagangan, pergerakan lalu lintas orang dan barang, dsb. Dalam menganalisis transaksi perdagangan, perlu juga diingat bahwa dalam kenyataannya volume transaksi perdagangan tidaklah semata-mata ditentukan oleh faktor penduduk dan jarak saja; melainkan masih banyak faktor lain yang turut berpengaruh seperti antara lain tingkat pendapatan penduduk, ketersediaan prasarana penunjang, PDRB, dsb. Salah satu pengembangan dari model gravitasi adalah konsep energi demografik yang diperkenalkan oleh (Isard, 1956). Melengkapi gaya tarik menarik yang berbanding lurus dengan perkalian massa (penduduk) dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak;

Pola kegiatan ekonomi masyarakat secara umum dapat dijadikan sebuah studi untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terbentuknya wilayah ekonomi baru diantara kegiatan ekonomi yang sudah berjalan,. Dari latar belakang yang telah disusun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk model keterkaitan wilayah yang dilihat dari PDRB di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia beserta potensi terbentuknya pusat ekonomi baru.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB dan jarak antar Provinsi pada tahun 2016. Data PDRB merepresentasikan kegiatan ekonomi di setiap Provinsi sedangkan data jarak digunakan untuk representasi akses dan konektivitas antar daerah. Penelitian ini menekankan pada penentuan lokasi *economic hub* dari informasi data tersebut diatas.

Karena data bersifat sekunder dan pengolahan data menggunakan pendekatan teori gravitasi, dimana merujuk pada (Isard, 1956) memperkenalkan konsep energi demografik yang terjadi antara dua massa populasi. Menurut Stewart besaran energi demografik adalah berbanding lurus dengan perkalian populasi dan berbanding terbalik dengan jarak. :

$$E = G \cdot \frac{(P_1)X(P_2)}{(d_{12}^2)} \dots\dots\dots 2$$

Dalam hal ini G merupakan konstanta yang berkaitan dengan faktor gravitasi kependudukan. Selanjutnya Stewart juga memperkenalkan konsep potensial demografik untuk menggambarkan potensial dari suatu lokasi dilihat dari besaran potensial demografiknya. Misalkan suatu lokasi *i* memiliki potensial pengaruh demografi dari suatu pusat massa (penduduk) di *j*, maka potensial demografis lokasi *i* tersebut dinyatakan sebagai V_{ij} yang merupakan fungsi dari populasi di *j* dan berbanding terbalik dengan jarak *i* ke *j* :

$$V_{ij} = G \cdot \frac{P_j}{d_{ij}} \dots\dots\dots 3$$

Jika lokasi *i* tersebut dipengaruhi oleh beberapa kota/pusat massa, maka total potensi demografis dari lokasi tersebut merupakan penjumlahan aljabar dari seluruh potensi demografis yang dimilikinya :

$$V_i = G \cdot \sum_{j=1}^n \frac{P_j}{d_{ij}} \dots\dots\dots 4$$

Dengan mengadopsi persamaan yang dikembangkan oleh (Isard, 1956) dengan menambahkan bilangan satu kepada pembagi, maka bentuk persamaan potensial demografiknya adalah sebagai berikut :

$$V_i = G \cdot \sum_{j=1}^n \frac{P_j}{(1+d_{ij})} \dots\dots\dots 5$$

dimana V_i adalah nilai potensial demografik, G merupakan konstanta gravitasi (ditetapkan bernilai satu) P_j adalah PDRB Provinsi di Indonesia , d_{ij} adalah jarak antar provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktifitas ekonomi masyarakat secara umum dapat tergambar pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai yang terermin dalam PDB merepresentasikan besaran output yang dihasilkan pada setiap sector dikalikan dengan harga pada saat output tersebut dihasilkan yang disebut sebagai PDB atas dasar harga berlaku atau PDB nominal. Demikian juga aktifitas di setiap daerah juga dapat tercermin dalam PDRB masing-masing daerah. Semakin tinggi aktifitas ekonomi di suatu wilayah akan meningkatkan nilai PDBnya. Indonesia terdiri atas 34 Provinsi dengan beragam karakter ekonomi kewiayahannya masing-masing. Setiap wilayah memiliki keunggulan yang saling melengkapi diantara provinsi yang lainnya.

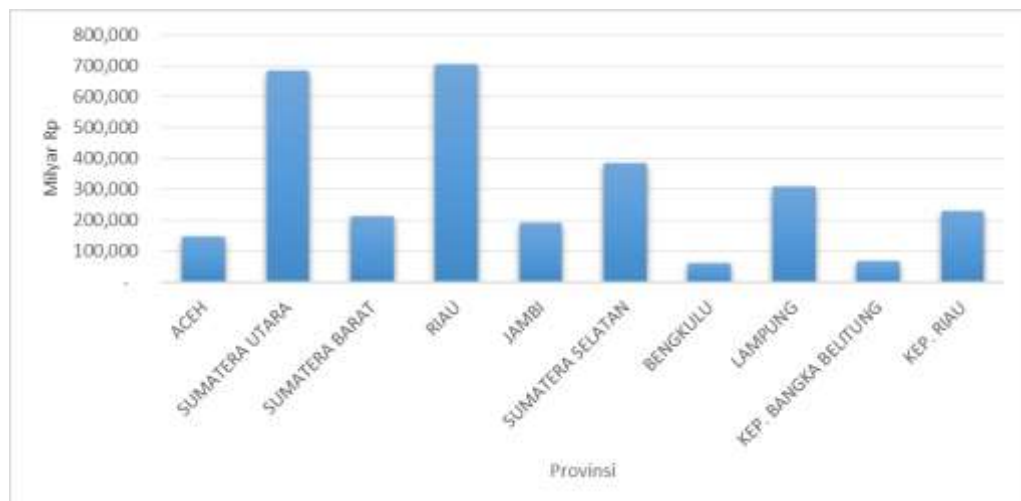
Tabel 2
Potensial Demografik Pulau Sumatera

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGGULU	LAMPUNG	KEP. BANG.BEL	KEP. RIAU	POTENSIAL DEMOGRAFIK
ACEH	146483	1598	212	599	123	204	37	147	22	74	149499
SUMATERA UTARA	342	684069	217	805	196	382	42	164	24	77	686318
SUMATERA BARAT	145	692	214585	2408	428	594	96	306	36	80	219370
RIAU	124	780	732	705679	567	514	75	312	35	157	708976
JAMBI	94	700	480	2094	191099	790	129	436	41	122	195986
SUMATERA SELATAN	78	681	332	945	393	383759	206	854	51	160	387459
BENGGULU	90	470	340	876	407	1301	60676	494	46	150	64848
LAMPUNG	70	364	213	714	270	1063	97	308451	69	249	311559
KEP. BANGKA BELITUNG	45	237	109	353	111	280	40	302	69973	263	71714
KEP. RIAU	47	228	75	483	102	268	40	334	80	229743	231399

Sumber : data primer diolah 2018

Hasil analisis pulau sumatera yang terdiri atas 10 Provinsi menunjukkan nilai keterkaitan yang beragam. Dengan menggunakan pembobot Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jarak, dapat dihitung hasil potensial demografik yang mana provinsi Riau menjadi pusat kegiatan ekonomi di diantara provinsi lain di wilayah pulau sumatera. Keberadaan provinsi tersebut tidak terlepas dari interaksi yang tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sehingga untuk Pulau Sumatera tempat yang berpotensi berkembang menjadi sentra ekonomi baru adalah Sumatera utara dan Selatan sedangkan jika di bawa ke ranah nasional, maka Riau menjadi tulang punggung untuk mega Hub perekonomian di Indonesia.

Proses Riau menjadi mega Hub di wilayah Pulau Sumatera tentu tidak hanya dipengaruhi karena factor geografis saja. Jika ditelaah lebih jauh riau menjadi provinsi yang memiliki tingkat PDRB tertinggi di wilayah pulau Sumatera dibandingkan Provinsi lain sejak tahun 2010. Seperti yang terlihat dalam gambar dibawah yang menunjukkan nilai PDRB antar provinsi di pulau Sumatera pada tahun 2017.



Gambar 1

PDRB Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017 (dalam Milyar Rp)

Pulau Jawa ditempati oleh Provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, selain itu perkembangan industry di berbagai wilayah di provinsi yang terletak di pulau Jawa juga berkembang

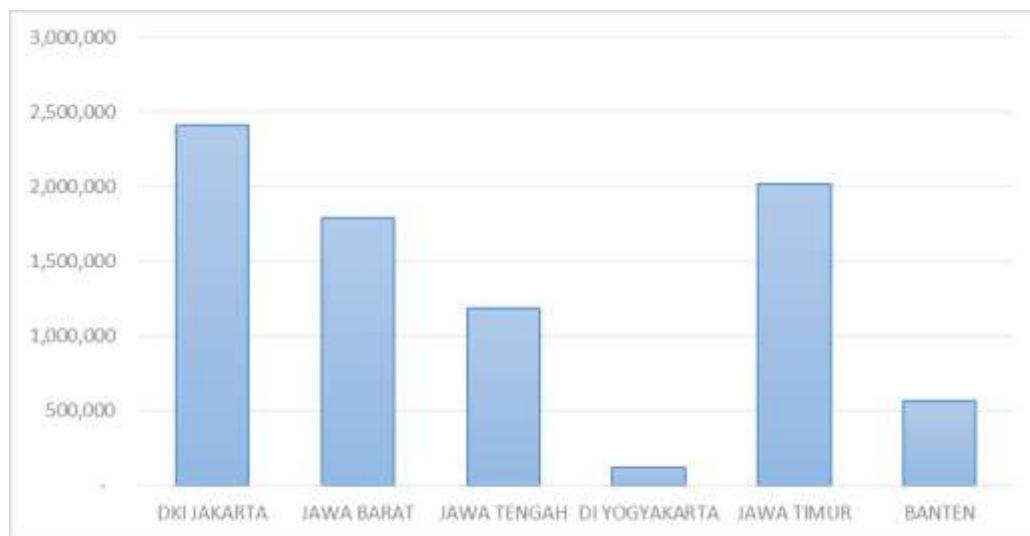
cukup baik. Hasil perhitungan potensial demografik yang dilakukan untuk mencari economic hub di wilayah pulau Jawa terlihat seperti pada table di bawah. Persaingan usaha yang terjadi di Provinsi-provinsi di pulau Jawa menjadikan keunggulan demografik bagi wilayah provinsi tersebut untuk dapat menjadi mega Hub di wiayah pulau Jawa, namun demikian tentu tidak semua wilayah provinsi dapat dijadikan Mega Hub untuk wiayah Pulau Jawa.

Tabel 3
Potensial Demografik Pulau Jawa

	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN	Potensial Demografik
DKI JAKARTA	2410373.4	10324.23	2574.943	232.3058674	2808.344	4375.41984	2,430,689
JAWA BARAT	13932.79422	1786092	2467.877	304.0125255	2732.341	1913.31919	1,807,443
JAWA TENGAH	5228.575705	3713.29	1187049	1267.796915	6730.666	971.478761	1,204,961
DI YOGYAKARTA	4698.583626	4556.358	12628.18	119172.91	6100.301	877.805848	148,034
JAWA TIMUR	3352.39694	2416.904	3956.829	360.039003	2019200	675.963066	2,029,962
BANTEN	18685.06512	6054.55	2043.113	185.3388958	2418.203	564429.16	593,815

Sumber : data primer diolah 2018

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa DKI Jakarta tetap dijadikan Mega Hub untuk wilayah di Pulau Jawa yang kemudian hub tersebut menyambung langsung ke provinsi Jawa Timur. Dua provinsi tersebut mewakili pulau jawa dalam menentukan posisi mega hub untuk seluruh wilayah Indonesia. kajian lebih lanjut adalah dengan melihat nilai perkembangan PDRB pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa.



Gambar 2

PDRB Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017 (dalam Milyar Rp)

Dilihat dari perbandingan PDRB di Provinsi yang terletak di Pulau Jawa DKI Jakarta dan Jawa Timur menempati posisi utama diantara yang lainnya. Kegiatan ekonomi yang bergerak di kedua Provinsi tersebut dapat menentukan sentra indorstri di wilayah pulau Jawa. Namun keberadaan Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting bagi DKI Jakarta, dimana sebagian besar proses produksi

industry yang ada terletak di Jawa Barat, sedangkan sumbagan PDRB di provinsi DKI Jakarta lebih pada kegiatan jasa dan perdagangan.

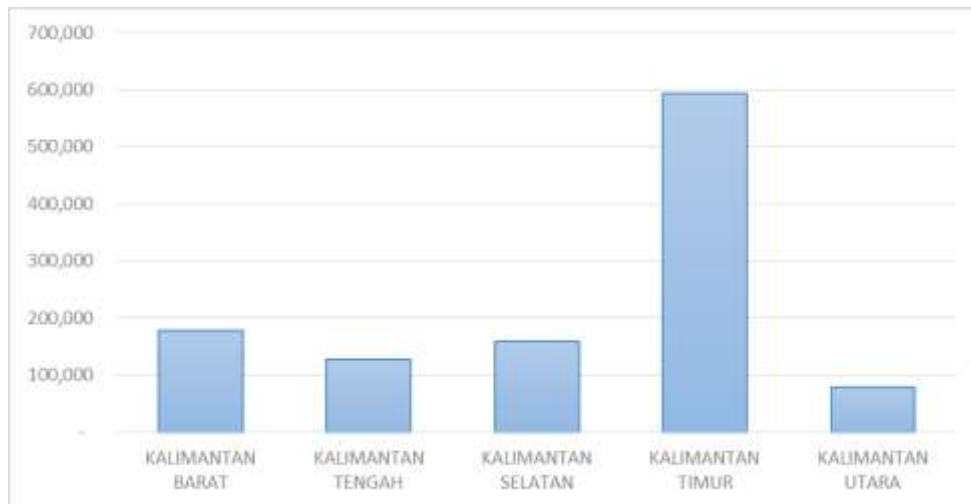
Pembagian yang ketiga adalah wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. ketiga provinsi tersebut berkembang dari kegiatan jasa dan pariwisata. Bali menjadi pusat kegiatan diantara–ketiga provinsi yang lainnya. Bahkan tidak hanya di ketiga wilayah tersebut, Provinsi Bali menjadi tumpuan kegiatan pariwisata di seluruh Indonesia. Mega hub yang berikutnya adalah Provinsi Bali yang kemudian dapat dikembangkan ke Provinsi NTB.

Tabel 4
Potensial Demografik Pulau Bali, NTB & NTT

	BALI	NUSA TENGGERA BARAT	NUSA TENGGERA TIMUR	Potensial Demografik
BALI	215360.92	326.9839	88.5046	215,776
NUSA TENGGERA BARAT	568.2346174	123926.9	129.4883	124,625
NUSA TENGGERA TIMUR	209.0882718	176.0325	91159.74	91,545

Sumber : data primer diolah 2018

Perkembangan ekonomi di Provinsi-provinsi pulau Kalimantan disumbang pada sector pertambangan dan perdagangan. Kalimantan Timur secara periodik sejak tahun 2010 memiliki dominasi dalam pembentukan PDRB. Hal tersebut didukung dari industry-industri pertambangan yang berkembang dengan baik di Provinsi tersebut. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan dominasi kegiatan ekonomi provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017.



Gambar 3
PDRB Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2017 (dalam Milyar Rp)

Kegiatan ekonomi yang berkembang baik di wilayah provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi pertimbangan untuk di tempatkannya mega hub di Indonesia. Hasil analisis potensial demografik pada provinsi-provinsi di pulau Kalimantan menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan timur yang dapat dijadikan mega hub utama dengan nilai potensial demografik sebesar 592.965. Sedangkan wilayah provinsi lain seperti Kalimantan Selatan yang direkomendasikan untuk menjadi daerah pendukung dan wilayah yang berpotensi sebagai penyangga mega hub pulau Kalimantan.

Pemilihan klaimanta selatan sebagai wilayah pendukung dan wilayah yang berpotensi sebagai pusat ekonomi baru bukan hanya berlatar belakang provinsi yang mempunyai nilai PDRB yang tinggi, nilai PDRB pada provinsi tersebut ketiga setelah Kalimantan barat.

Mega hub berikutnya adalah wilayah Indonesia Timur yang diwakili oleh pulau Sulawesi dan Irian Jaya. Jika dilihat nilai PDRB pada tahun 2017 provinsi Sulawesi selatan merupakan provinsi dengan nilai PDRB tertinggi diantara provinsi-provinsi yang terletak di pulau Sulawesi dan Irian Jaya. Irian Jaya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah justru bukanlah provinsi yang memiliki nilai PDRB yang dominan diantara provinsi yang lain. seperti diketahui bahwa PDRB merupakan rangkuman dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang menghasilkan produksi yang tidak hanya dibuat di wilayah tersebut, namun juga dikonsumsi di wilayah yang sama.

Tabel 6
Potensial Demografik Pulau Sulawesi dan Irian Jaya

	Kal.Bar	Kal.Teng	Kal.Sel	Kal.Tim	Kaltara	Potensial Demografik
KALIMANTAN BARAT	177468.59	111.3646	108.4934	292.4494176	30.35547	178,011
KALIMANTAN TENGAH	156.6360018	126176.1	388.3062	613.356646	50.3293	127,385
KALIMANTAN SELATAN	120.6448606	306.9977	159593.9	742.4843609	59.58927	160,824
KALIMANTAN TIMUR	87.59555281	130.617	199.9923	592502.52	44.30822	592,965
KALIMANTAN UTARA	69.59552549	82.03906	122.859	339.1542759	77406.46	78,020

Sumber : data primer diolah 2018

Nilai potensial demografik yang dihasilkan untuk provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia adalah antara 32.603 yaitu pada provinsi Maluku utara dan yang tertinggi adalah di Sulawesi Selatan dengan nilai potensial demografik sebesar 419.543. Sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk pulau Sulawesi yang dapat dijadikan mega hub adalah Provinsi Sulawesi selatan yang kemudian dilanjutkan ke arah timur Indonesia di Provinsi Papua. Adapun potensi wilayah yang dapat dijadikan sub hub di pulau Sulawesi adalah Sulawesi tengah dengan nilai potensial demografik sebesar 134.924

Tabel 7
Potensial Demografik Pulau Sulawesi dan Irian Jaya

	SULAWESI UTARA	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	GORONTALO	SULAWESI BARAT	MALUKU	MALUKU UTARA	PAPUA BARAT	PAPUA	Potensial Demografik
SULAWESI UTARA	110164.48	94.27206	314.5132	72.02761394	114.0183	32.0533738	13.87088	8.8515	18.00114	44.25298	110,876
SULAWESI TENGAH	77.36269663	134243.4	328.8317	85.01993671	41.37432	61.1388426	14.50664969	9.017203	18.52608	44.57209	134,924
SULAWESI SELATAN	82.70606607	105.3716	418931.6	143.2869333	32.77757	157.214167	15.00330324	9.244506	19.17429	46.40722	419,543
SULAWESI TENGGARA	73.83678284	106.2052	558.5754	107465.2	28.48109	48.9110741	15.71267928	9.694374	19.70589	46.74687	108,373
GORONTALO	363.5791419	160.7706	397.4683	88.59455894	34547.56	41.3980878	16.07367191	9.881375	20.14269	47.92782	35,693
SULAWESI BARAT	89.12983819	207.1658	1662.427	132.6730864	36.09985	39617.97	16.78399832	10.08833	20.70028	49.15737	41,842
MALUKU	38.31808	48.83354	157.6116	42.34247439	13.92485	16.6742298	39878.78	10.48832	21.38474	50.61157	40,279
MALUKU UTARA	30.21516182	37.50864	120.0033	32.28152598	10.57794	12.3844858	12.96027949	32272.57	21.7607	52.51176	32,603
PAPUA BARAT	27.62399198	34.64346	111.8941	29.49909415	9.693479	11.4238668	11.87929103	9.782531	71788.56	53.97617	72,089
PAPUA	25.44214319	31.22666	101.4608	26.21741888	8.641211	10.163666	10.5332224	8.844223	20.22213	191615.4	191,858

Sumber : data primer diolah 2018

SIMPULAN

Keberagaman sumber daya alam di Indonesia menjadikan karakter ekonomi kewilayahan yang semakin kuat. Setiap provinsi di masing-masing pulau memiliki potensi untuk dapat dijadikan mega hub seperti halnya di pulau Sumatera, dimana Provinsi Riau menjadi mega hub di wilayah barat, yang didukung oleh provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfungsi sebagai sub hub di wilayah pulau tersebut, namun juga berpotensi sebagai pusat ekonomi baru di wilayah pulau Sumatera. Di pulau Jawa DKI Jakarta sebagai Ibu Kota merupakan pusat mega hub Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke wilayah timur yaitu Jawa Timur. Namun kekuatan DKI Jakarta tidak hanya berdiri sendiri namun juga didukung oleh Provinsi Jawa Barat. Ke arah timur mega hub berikutnya adalah provinsi Bali dan kemudian dilanjutkan ke provinsi NTB yang berpotensi sebagai pusat ekonomi baru. Ke wilayah Indonesia Timur Papua dan Sulawesi selatan menjadi mega hub berikutnya yang kemudian dilanjutkan Provinsi Kalimantan timur.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Penelitian ini terselenggara berkat dukungan dana dari Universitas Muhamamdiyah Malang melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program P2i tahun 2017/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Alstadt, B., Weisbrod, G., & Cutler, D. (2012). Relationship of transportation access and connectivity to local economic outcomes: statistical analysis. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*(2297), 154-162.
- Cohen, J. P. (2010). The broader effects of transportation infrastructure: Spatial econometrics and productivity approaches. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 46(3), 317-326.
- Fistung, F. D., Miroiu, R., Tătaru, D., Iștoc, M., & Popescu, T. (2014). Transport in support of the process of socio-economic development of Romania, after 1990. *Procedia Economics and Finance*, 8, 313-319.
- Hill, H., Resosudarmo, B. P., & Vidyattama*, Y. (2008). Indonesia's changing economic geography. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), 407-435.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The review of Economics and Statistics*, 33(4), 318-328.
- Isard, W. (1956). Location and space-economy.
- Kasikoen, K. M. (2011). Tipologi Perkotaan di Kabupaten Cilacap. *Planesa*, 2(1).
- Muta'ali, L. (1999). Penerapan Konsep Pusat Pertumbuhan Dalam Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah. *Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada*.
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah HINTERLAND di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(02), 193-219.
- Sabana, C. (2007). *Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.